unsur produksi atau sebagai salah satu sumber yang Allah jadikan sarana rizki, ialah: untuk menunjukkan mana jalan yang paling utama, yang membuat manusia mau mengeksploitir unsur ini, dan mau memanfaatkannya hingga menghasilkan kekayaan yang sebesar-besarnya". (Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, hlm. 79).

Adapun cara-cara lain untuk mendapatkan kepemilikan menurut Islam antara lain :

1. Yang mengarahkan kepada jaminan sosial dalam Islam yang bertitik tolak pada azas wajib bekerja dan larangan terhadap pengangguran bahkan larangan terhadap minta-minta, kecuali bagi orang yang lemah dan orang yang membutuhkan dan tidak mempunyai jalan usaha.
2. Menganjurkan dan menggalakkan semangat guna mengeluarkan sadaqah, yang dianggap sebagai hak orang Muslim dari harta orang kaya kemudian baru lah kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan orang yang butuh, yang diambil dari baitul mal sesuai dengan norma-norma yang jelas mengenai keperluan itu dan dalam situasi yang menimbulkan kewajiban tadi. (Dr. Ahmad Zaki Yamani, hlm: 72 - 74).

Sedangkan dari sisi lain cara-cara mendapatkan hak milik diantaranya :

- a. Dengan cara pengambilan atau penguasaan benda-benda bebas.
- b. Dengan cara Aqad (Perjanjian Perserikatan) pemindahan milik.
- c. Dengan cara penggantian (Al-Khalafiah) menempati atau mengganti kedudukan pemilik yang memiliki benda yakni : Pewarisan.

Ketiga cara memperoleh kepemilikan tersebut sudah menjadi persepakatan para ulama⁹ dan ahli fiqih, akan tetapi golongan Maliki, Safi'i dan Ahmad menambah cara keempat, yaitu Syuf'ah, golongan Hanafi berpendapat bahwa: Syuf'ah bukan merupakan cara memperoleh milik yang berdiri sendiri, akan tetapi termasuk aqad, karena dalam Syu'fah milik baru terjadi apabila ada penyerahan benda yang sukarela, dari pemilik baru engan (menolak) dan dibayar oleh penuntut Syuf'ah, ini merupakan Aqad baru. (Drs. Masduha Abdurrahman, hlm. 88).

Menurut Dr. Mustafa Zarqa' bahwa: Dari ketiga cara memperoleh milik penuh yang disepakati tersebut terdapat cara keempat memperoleh milik pe-

kannya sebagai cara tersebut.

- b. Bukan karena adanya usaha seseorang ialah : Cara-cara memperoleh milik penuh dengan pengantian yakni, pewarisan, pewarisan menetapkan milik bukan karena usaha seseorang baik pemilik pertama: yang mewariskan maupun pihak yang kedua: Ahli Waris.

2. Yang menimbulkan (melahirkan) milik pertama dan yang memindahkan milik.

- a. Yang menimbulkan (melahirkan) milik pertama ialah: Pengambilan atau penguasaan benda mu-bah, yang dimaksud ialah: Bahwa tetapnya benda bebas tersebut sebagai milik ialah: Sesudah ternyata benar-benar benda tersebut tidak ada yang miliki karena benda bebas belum diambil dan dikuasai seseorang yang tidak disifati sebagai benda yang dimiliki. termasuk dalam hal ini adalah : Pengambilan atau penguasaan atas benda ghonimah, karena harta benda musuh dipandang sebagai harta benda bebas.

- b. Yang memindahkan milik ialah: Aqad (Perjanjian Perikatan) dan pengantian (Pewarisan). Dengan cara yang tidak ditetapkan sebagai mi-

lik seseorang kecuali apabila benda yang menjadi obyek aqad atau pewarisan itu telah dimiliki sebelumnya oleh pihak lain.

3. Yang merupakan perbuatan dan milik terwujud dengan perbuatan saja.

Yang merupakan perkataan dan milik terwujud perkataan atau pengantinya. Yang merupakan penetapan syara' (I'tibariyah) dan milik terwujud dengannya :

- a. Yang merupakan perbuatan dan milik terwujud dengan perbuatan saja, yaitu pengambilan atau penguasaan benda bebas. Oleh karena itu sah nya pengambilan atau penguasaan benda bebas oleh mereka yang tidak cakap bertindak, seperti: anak kecil, orang yang dibawah perwali an, orang gila, apabila mengambil atau menguasai benda bebas, maka menjadi milik mereka, hanya saja aqad mereka, kadang-kadang dipandang tidak sah dan kadang-kadang ditanggihkan sampai ada izin wali atau pihak lain yang berwenang.
- b. Yang merupakan perkataan dan milik terwujud

pada pihak lain. Sedangkan hak mengambil manfaat adalah, Kewenangan yang semata-mata rukhsah atas dasar izin umum seperti hak mempergunakan fasilitas umum misalnya, jalan raya, sungai -sungai besar, tempat pendidikan dan sebagainya.

Dengan demikian ada dua macam cara memperoleh hak milik dengan mengambil manfaat :

- a. Mempergunakan fasilitas umum (sebagai izin umum) seperti jalan-jalan raya, tempat-tempat pendidikan untuk pelajar-pelajar, mahasiswa dan sebagainya.
- b. Izin perkenan dari pemilik benda (sebagai izin khusus dan ibahah) untuk mengambil manfaat baik untuk kepentingan seseorang tertentu atau tidak tertentu seperti izin para pedagang untuk menginap di rumahnya.
- c. Karena sewa menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Apabila dalam perjanjian ditentukan suatu ketentuan atau syarat khusus dalam mengambil manfaat itu sendiri. (Drs. Masduha Abdurrahman , hlm. 96).

Mengenai cara memperoleh hak milik atas harta kekayaan Al-Qur'an memberikan beberapa ketentuan :

1. Dengan usaha yang halal (QS. 2, 4:32)
2. Melalui pewarisan (QS. 4:7)
3. Melalui hibah (QS. 2:177)

Di antara ketiga cara ini yang sangat dianjurkan adalah : Dengan usaha melalui kerja keras dengan mempergunakan akal dan tenaga. (Mohammad Daud Ali, hlm. 21).

Pendapat-pendapat ulama' dalam menangani cara mendapatkan kepemilikan diantaranya adalah: Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik menjadi miliknya yang menghidupkan tanah yang tandus. Dari diperoleh dua riwayat. Yang menjadi milik orang yang menghidupkan tanah itu.

"1795. Tanah yang dihidupkan itu menjadi milik bagi yang telah menghidupkan, kalau untuk tanaman, dengan menanam tanaman dan menggali sumur-sumur, dan kalau untuk didiami dengan mendirikan rumah dan melotengkannya, mengatapkannya".

Kata Abu Hanifah dan Ahmad: Dengan memancarkan dan dengan menghasilkan air untuknya. Demikian kalau dijadikan kebun. Kalau untuk didirikan

(Res Nutlies) dalam hubungan ini menimbulkan persoalan harapan. Jika seorang memasang jaring dengan maksud untuk memiliki burung yang ditangkapnya, tetapi kalau pemasangan jaring itu dimaksudkan sekedar untuk menjemurnya, kemudian ada burung yang ada pada jaring itu lantas diambil oleh orang lain, maka burung itu menjadi hak miliknya, sekalipun burung itu terjerat oleh jaring orang lain. Tentang logam berharga dibedakan antara tambang (mad'in) dan barang tambang rikaz tambangnya menjadi pemilik yang punya tanah, sedang barang tambang menjadi penemunya (setidak-tidaknya menurut doktrin Abu Yusuf) seperlima penemuan harta tambang, demikian juga harta yang berasal dari rampasan perang dikeluarkan untuk baitul mal. Tetapi harta itu hanya berlaku jika harta itu berasal dari sebelum masa Islam, harta pada masa Islam bukanlah harta yang tidak ada pemiliknya, melainkan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan harta ini dipandang sebagai harta yang ditemukan (luata). Pemilikan tidak bisa diperoleh oleh penemuan, si penemu hanya berhak untuk mengeluarkan sadaqah dari sebagian barang temuannya, bila penemu-

an resmi telah lewat masanya tanpa ada hasil, jika si penemu miskin dia berhak memanfaatkan barang temuan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi sebaiknya dia menahannya sebagai barang amanah, yang berarti dia bermaksud untuk menyerahkan kepada pemiliknya, bila tidak bermaksud demikian, maka penahan harta temuan itu menjadi tindakan perampasan. Bagaimana caranya pemilikan itu diperoleh (Istighal) merupakan unsur atau bagian penting dalam hak pemilikan.

Dalam membuktikan kepemilikan lebih diutamakan bukti jenis pemilikan yang tidak dapat diulang seperti: Hasil tenunan, pemerasan susu, pemotongan bulu domba, dari pada bukti pemilikan yang diulang seperti: Bangunan (karena dalam waktu tertentu dapat rubah), tanaman, penyemaian.

2. Pemilikan yang berasal dari orang lain ini terjadi :

- a. Melalui pemindahan pemilikan dengan jalan pemindahan penguasaan, misalnya dengan penyerahan (taslim) dan penerimaan penguasaan kab, tasallum, menerima penyerahan; istis, penerimaan; tawabudl, penerimaan penguasaan se-

cara timbal balik cara pemilikan jenis ini terjadi berkaitan dengan sejumlah kewajiban. Taslim dan kabl, tidak mesti mempengaruhi transfer pemilikan dalam semua keadaan, misalnya, tidak dalam kasus satu penjualan dengan hak membeli kembali, dengan alasan hal ini tidak mengandung niat sepenuhnya untuk transfer pemilikan.

- b. Pemilikan yang berasal dari orang lalu lebih lanjut terjadi melalui transaksi dengan transaksi mana menimbulkan hak-hak in rem pemilikan tanpa menerima penguasaan. Yang terpenting dari hal yang semacam ini adalah pewarisan yang menimbulkan pemilikan, bukan semata-mata tuntutan terhadap ahli waris. Perjanjian dan kontrak-kontrak juga dipandang sebagai pemberian atau penyerahan hak in rem; hukum Islam tidak membedakan hal ini secara jelas.
- c. Bank jaminan (rahn) menempati posisi khusus, karena penguasaan diambil tetapi pemilikan tidak dipindahkan; pemindahan hanya terjadi di bawah kondisi tertentu, sebagai akibat dari kontrak. Penghentian pemilikan biasanya

terjadi melalui transfer; ini bisa terjadi berlawanan dengan kemauan si pemilik seperti dalam hal penyitaan bila si penyita memperoleh pemilikan. Satu kasus penting dalam hal ini adalah: kemurtadan, terputusnya kepemilikan karena murtad ditangguhkan sampai matinya orang yang murtad atau dia meninggalkan negeri Islam kembali.

Pemilikan bersama (syarikat mal) dibahas secara detail yang bertalian dengan tanah dan budak seperti lazimnya; ini timbul dari warisan, juga dari ketidakjelasan (sengaja dan ketidaksengajaan) dan timbul dari perpartneran. Milik bersama menimbulkan ketidakjelasan menyebabkan pembatasan dalam penjualan; bagian satu partner boleh dijual kepada orang lain kalau mendapat persetujuan dari pihak partnernya, karena masing-masing partner secara individual memiliki sebagian dari barang serikat yang kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari bagian lainnya, milik bersama terdiri dari dua tergantung apakah barang itu dapat dibagikan atau tidak. (Joseph Schacht, hlm. 175).

C. Batas-Batas Kepemilikan

Hukum Islam dalam mendefinisikan benda kekayaan tidak terbatas pada benda-benda yang dapat diraba, benda (aym) dipertentangkan dengan tuntutan atau hutang (dayn), tetapi manfaat (manfaat manafi) dari benda tertentu yang dapat dipakai untuk membentuk satu katagori yang terpisah, sebagian dari manfaat benda itu sendiri disebut "Rakhaba". Manfaat dalam hal tertentu dipandang sebagai benda, penggunaannya bukan satu ius in realiena tetapi sebagai pemilikan manfaatnya. (Joseph Schacht, hlm. 172).

Selain dari itu menurut sistem ekonomi Islam lama pemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia, kalau seorang manusia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. (Mohammad Daud Ali, hlm. 7).

Setelah itu terdapat tuntutan yang penting yang diwajibkan oleh ajaran-ajaran budi pekerti dalam tuntutan-tuntutan sosial dan ekonominya, maka

atas orang Islam terhadap pemilikan hartanya itu batas-batas yang menghambat jalan bebasnya mengenai apa yang dimilikinya. Batas-batas ini adalah: Batas budi pekerti yang dilaksanakan oleh setiap orang Islam atas dorongan iman yang mengawasinya. Pengawas yang mengawasinya itu ialah: Pencipta dari harta itu sendiri dan yang meletakkannya sebagai amanat di tangan manusia. Disamping itu terdapat dorongan ketakutan kepada hari kemudian. Bila seorang muslim membangkang terhadap batas-batas ini atau menyeleweng dari padanya, maka ia melakukan dosa. Dan setiap dosa mempunyai akibat-akibat sendiri disamping apa yang dilakukan terhadapnya oleh yang berkuasa sebagai wakil dari masyarakat menurut rencana-rencana yang menjamin penghormatan manusia akan batas-batas tersebut dan supaya mereka tunduk kepadanya.

Setelah kita melihat mengenai batas-batas ke pemilikan yang sudah disebutkan di atas, maka dari sisi lain terdapat pula mengenai batas-batas itu, yang kalau kita sebutkan ada delapan di antaranya:

1. Membatasi pemilik harta dengan melazimkan atasnya memperkembangkan uangnya. Dengan demikian ia tidak menghalangi perkembangan uang itu untuk

pertumbuhan kekayaan masyarakat.

2. Membatasi kebebasan pemilik harta dengan melazimkan ia menunaikan zakat uangnya jika telah mencapai nisab zakat.
3. Membatasi kebebasan pemilik harta itu dengan melazimkan ia membelanjukannya ke jalan Allah menurut kadar yang menutupi tuntutan dan keperluan masyarakat.
4. Membatasi kebebasan pemilik harta itu dengan melazimkan atasnya tidak menjadikan hartanya itu sumber bahaya bagi orang lain atau bagi masyarakat.
5. Membatasi kebebasan pemilik harta itu dengan melazimkan atasnya menghalangi dirinya dari memperkembangkan uangnya dengan riba atau dengan penipuan atau dengan monopoli.
6. Membatasi kebebasan pemilik harta itu dengan melazimkan atasnya tidak keluar dari kebiasaan dalam warisan dan wasiat.

Batas-batas yang demikian itu berlaku terhadap hak milik perseorangan yang diwajibkan oleh ajaran-ajaran budi pekerti Islam. Dan ajaran-ajaran itu melaksanakan dengan segala bijaksana.

Dan terdapat pula batas-batas dan tuntutan-tuntutan lain yang tidak langsung. Itupun diwajibkan oleh ajaran budi pekerti Islam sekalipun ia tidak berhubungan langsung dengan hak milik perseorangan, hubungannya ialah: Hubungan Inderat, sebab ia berpusat kepada kerja usaha yang menjadi sumber penting dari sumber hak milik dan pencaharian harta. (Dr. Mohammad Abdullah Al-Arabi, hlm. 159).

Dari tinjauan lain bahwa bagi orang yang telah menguasai tanah, dan dia memberi tanda dengan suatu tanda atau memagarinya dengan pagar, kemudian ia tidak mengharapnya menjadi produksi, haknya menjadi gugur setelah keadaan ini berlangsung selama tiga tahun.

Dari Salim bin Abdullah, bahwa Umar bin Khatib ra. berpidato di atas mimbar: "Siapa yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya. Bagi yang mengabaikannya selama dari tiga tahun, ia bukan lagi menjadi haknya. Karena banyak orang yang mengabaikan tanah yang telah dia kuasai tanpa mereka kerjakan/tanami. (Sayyid Sabiq, hlm. 153).

Berdasarkan kebenaran bukti yang menguraikan ketidak berdayaan manusia, disamping menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah secara logis dan moral, menunjukkan pula bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi milik atau dianggap milik manusia dalam pengertian sebenarnya. Dengan kata lain bahwa manusia dianggap sebagai anak, seperti anak yang menetek, masih harus dituntun duduk di atas pangkuan orang tuanya dan berjalan memegangi jari-jari mereka. Bahkan ia lebih tidak berdaya karena kedudukan Allah jauh lebih tinggi dibanding orang tua itu.

Jadi, segala yang dianggap sebagai milik manusia, pada dasarnya adalah milik Allah dan telah menunjukkan manusia pada waktu tertentu dan dengan cara terbatas. (Dr. A.H. Al-Hasani An-Nadwi, hlm:96)